

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat S. (n.d.). Lindungi Korban KDRT Cimahi Bentuk Satgas Perempuan. Diakses 29 November 2024. Diakses dari <https://jabar.antaranews.com/berita/22121/lindungi-korban-kdrt-cimahi-bentuk-satgas-perempuan>.
- Al, Y., Putra, R., Herawati, R., & Astuti, P. (n.d.). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 13, no. 2, pp. 765-779, Apr. 2024.<http://www.fisip.undip.ac.id>
- Alfionita, A., & Haji, S. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Wonogiri. *Wacana Publik*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63354>
- Anis Ribcalia Septiana, R. T. (2024). Kolaborasi Polres Kolaka Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Anak. *Gorontalo : Jurnal Administrasi Negara*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arrozaaq, D. L. C. (n.d.). (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo).
- Aziza Bila, B. S. (2019). Strategi Collaborative Governance Dalam Pemerintahan. *Padang: Jurnal Transformasi Administrasi* .
- Brillianto, H. I., Suwitri, S., & Afrizal, T. (n.d.). Analisis Kolaborasi Stakeholder Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Semarang.
- Citra Pragitha Rahmawati, D. H. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya. Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2616>
- Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. *urnal Ilmiah Administrasi Publik*. 7(2).
- Galih Persiana, A. Z., & Mayang Ulfah Namarinda. (2024, July 20). Undak Usuk Basa Sunda, Pengertian dan Contohnya. Diakses 29 12 Desember 2024. Diakses dari <https://jabar.idntimes.com/life/education/azzis-zilkhairil/undak-usuk-basa-sunda-pengertian-dan-contohnya>
- Gunawan, A., & Farid Ma, M. (n.d.). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya).
- Gusmiara, A., A□, D., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. In *JIAP* (Vol. 7, Issue 2).

- Hakim, M. L. (2024). Desain Kebijakan City Branding Daerah. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 15–37. <https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150>
- Haryanto, A. (2023). 45 Kasus Kekerasan Seksual Anak Terjadi di Cimahi, Korban Didominasi Laki-laki. Diakses pada 12 Desember 2024. Cimahi: jabar.inews.id.
- Islam, U., Sunan, N., Djati Bandung, G., Wahyu, R., Universitas, S., Negeri, I., Gunung, S., & Bandung, D. (n.d.). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Hakekat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Kartika Yusrina*. 5(2), 2022. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>
- Jawab Kepala Puslatbang KHAN LAN Ir Faizal Adriansyah, P. R., Si Redaktur Kabid Kajian Hukum Administrasi Negara Puslatbang KHAN LAN Said Fadhil, M. R., Penyunting Rati Sumanti, M., Sos, S., Prianto Sinurat, H., Yunita, E., Si, S., Maritha, D., Veri Mei Hafnizal, M., Sahputra, M., Desain Grafis Mohd Febrianto, M., Fahmi Salim, J., Ilham Khalid SH Sekretariat Hilma Yuniasti, Ms. M., Mitra Bestari Bujang Syaifar, S., Roli Ilhamsyah Putra, T., Heikal Daudy, M., Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Jl Muhammad Hasan, P. T., Imarah, D., & Besar, A. (n.d.). Penerbit LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
- Jayanti Sari, N. S. (2021). Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Aceh: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*.
- Julita, M., & Laila Meilani, N. (n.d.). Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi (Vol. 7).
- Julita, M., & Meilani, N. L. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi. 7.
- Kurniawan, D., & Saputra, A. (2019). Penerapan K-Nearest Neighbour dalam Penerimaan Peserta Didik dengan Sistem Zonasi. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 9(2), 212. <https://doi.org/10.21456/vol9iss2pp212-219>
- Lindungi Korban Kekerasan Seksual, Pemerintah Kembali Terbitkan Satu Peraturan UU TPKS. (2024, April 4). Diakses 1 Februari 2025. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2MQ==>
- Luqito, D., & Arrozaaq, C. (n.d.). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo).
- Nia Sukmawati, A. S. (n.d.). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Bojonegoro . Bojonegoro.
- Nugrahawan, D. S., & Si, S. (n.d.). Pj. Wali Kota Cimahi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

- Nuradhawati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 149–184. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.46>
- Pemerintah Terus Dorong Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. (2024, January 17). Diakses 3 Februari 2025. Diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-terus-dorong-upaya-penanganan-tindak-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Pemkot Cimahi Tangani Puluhan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan. (2024, July 16). Diakses 1 Februari 2025. Diakses dari <https://ppid.cimahikota.go.id/artikel/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana--pemkot-cimahi-tangani-puluhan-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan>
- Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cimahi, 2023. (2024, February 21). Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. <https://cimahikota.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-cimahi.html?year=2023>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Dalam Penanganan, Pelindungan, Dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Pemerintah Pusat, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (191) (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/298846/perpres-no-98-tahun-2024>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://jdih.kemenpppa.go.id/storage/1370/21062023_Draft-RPerpres-Kebijakan-Nasional-PTPKS-hasil-pembahasan---hasil-120623---Grand-Mercure-Jakarta_print-ttd.pdf
- PKP Kota Cimahi. (2020, November 12). Diakses 15 Desember 2024. Diakses dari [Perkim.Id. https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-cimahi/](https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-cimahi/)
- Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D., Ir. S., M. A., Ph. D. (n.d.). In Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS). Pusat Penguatan Karakter. <https://ppks.ub.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/Buku-Pedoman-Pelaksanaan-Permen-PPKS.pdf>

- Putra, Y. A. R., Herawati, N. R., & Astuti, P. (n.d.). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.
- Putri, A. A. (2023). Deretan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia. goodstats.id.
- Rahayu, S. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam) . Batam
- Rahayu, Y. S., Arkanudin, Alamri, A. R., Harahap, G. P. B., Amrulloh, Z., Sevilagustin, A., & Alamda, D. (2024). Peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 5(1), 53–67. <https://doi.org/10.52423/jkps.v5i1.19>
- Rahmawati, C. P., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Suarabaya. 9(1).
- Rahmi, N., & Rassanjani, S. (n.d.). Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh
- Rizqian Polri, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabellen*, 01(01), 51–61. <https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JJ>
- Sari, J., & Sriwahyuni, N. (2021). Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang. 1.
- Sorensen, E., & Torfing, J. (2005). The Democratic Anchorage of Governance Networks. *Scandinavian Political Studies*, 28(3), 195–218. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2005.00129.x>
- Sri Maulani. (2024a, Oktober). Ini Upaya Pemkot Cimahi Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Diakses 6 Februari 2025. Diakses dari <https://jabarekspres.com/berita/2024/10/18/ini-upaya-pemkot-cimahi-cegah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/>
- Sukmawati, N., & Suprastiyo, A. (n.d.). Collaborative Governance dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Bojonegoro.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2005). The democratic anchorage of governance networks. In *Scandinavian Political Studies* (Vol. 28, Issue 3, pp. 195–218). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2005.00129.x>
- Tiara Disa Pratiwi. (2024b, February 27). Sosialisasi Perlindungan Anak dan Perempuan di Cimahi, Upaya Mengatasi Kasus Penculikan dan Kekerasan. Diakses 4 Februari 2025. Diakses dari <https://jabarekspres.com/berita/2024/02/27/sosialisasi-perlindungan-anak-dan-perempuan-di-cimahi-upaya-mengatasi-kasus-penculikan-dan-kekerasan/>

- Tielung, F., Nurdin, N., & Sri, N. (2023). Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2). <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3780>
- Tugas Pokok & Fungsi Dinas DP3AP2KB. (n.d.). <https://dp3ap2kb.cimahikota.go.id/tugasfungsi>
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia 2022(122) (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam). (n.d.).
- Wajib Ada, Ini Fungsi dan Tugas Satgas PPKS di Setiap Kampus. (2024, June 27). Diakses 18 Februari 2025. Diakses dari <https://iblam.ac.id/2024/06/27/wajib-ada-ini-fungsi-dan-tugas-satgas-ppks-di-setiap-kampus/>